

Arah Pendidikan Buta Aksara

Oleh **Agus Wibowo dan Benny Setiawan**

Pemerhati Pendidikan, tinggal di Yogyakarta

BUTA aksara adalah keadaan ketika orang tidak mampu membaca dan menulis. Padahal, keduanya merupakan jendela untuk melihat dunia. Artinya, jika orang bisa membaca, dia melihat dunia baru dan segala perkembangannya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta teknologi informasi (TI). Akibat banyaknya penderita buta aksara, majalah *Time* pada 2007 lalu, melabeli kita sebagai bangsa yang tidak punya pengaruh atau kurang diperhitungkan dalam kancah hubungan internasional. Indonesia, tulis *Time*, bahkan tertinggal jauh tidak saja dari negara-negara maju Asia seperti Jepang, Singapura, Malaysia, dan sebagainya, tapi juga tertinggal dari negara-negara pendatang baru seperti Vietnam, Laos, bahkan Kamboja. Julukan sebagai bangsa tertinggal dan tidak punya pengaruh memang menyakitkan!

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, penderita buta aksara berjumlah 15,4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%. Setahun kemudian (tahun 2008), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), menyebutkan jumlah penderita buta aksara mencapai 10,1 juta orang. Menurut Depdiknas, tahun 2008 memang ada sedikit penurunan penderita buta aksara sebanyak 1,7 juta orang, jika dibandingkan dengan tahun 2007 (11,8 juta orang). Namun, BPS sendiri belum mengeluarkan data resmi mengenai adanya penurunan penderita buta aksara itu.

Data terakhir yang dirilis Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas, 2010), angka penderita buta aksara saat ini mencapai 8,4 juta jiwa. Sekitar 65% atau 5,46 juta jiwa di antaranya adalah kaum perempuan dengan usia rata-rata di atas 40 tahun. Menurut Dirjen PNFI, Dr Hamid Muhammad Phd (2010), setiap tahun, 880 ribu anak Indonesia

berpotensi buta aksara. Jumlah tersebut berasal dari daerah terpencil sekitar 300 ribu anak, dan 580 ribu atau 1,7% dari 1,29 juta anak-anak SD yang putus sekolah antara kelas 1 dan 3, tutur Dr Hamid Muhammad Phd.

Jika dilihat dari grafik penyebaran penderita buta aksara, perbedaan antara desa dan kota amat mencolok. Di kawasan perkotaan, jumlah penderita buta aksara hanya sekitar 4,9%. Sementara di daerah perdesaan, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 12,2%. Dari grafik penyebaran itu bisa ditarik kesimpulan bahwa sampai saat ini desa masih tetap menjadi penyumbang utama jumlah penderita buta aksara.

Komoditas politik

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam menyikapi persoalan buta aksara. Sejak tahun 1945 melalui bagian pendidikan masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, pemerintah melakukan gerakan 'melek' aksara, yang dikenal dengan nama Pemberantasan

dengan memperbaiki sistem pelatihan, metodologi pembelajaran, dan sistem penyelenggaraannya. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa program PBH yang dilakukan pemerintah dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, belum optimal menekan kenaikan angka penderita buta aksara? Lantas, langkah strategis seperti apa yang efektif untuk menekan laju peningkatan penderita buta aksara?

Jika kita cermati dengan saksama, ketidakberhasilan program PBH yang dilakukan pemerintah dari masa ke masa itu, disebabkan beberapa hal. Pertama, program yang dilakukan tidak pernah tuntas, bahkan sekadar tambah sulam. Itu dapat dilihat dari budaya ganti rezim ganti pula programnya, sehingga menimbulkan diskontinuitas. Kedua, setiap komponen tidak bekerja secara sinergis dan dengan visi yang sama. Akibatnya, program tidak bisa berjalan efektif, karena tidak jelas ujung pangkalnya.

gelam dalam kebodohan, dan sebuah bangsa ini semakin tertinggal, buta aksara harus segera dihilangkan. Melalui momentum peringatan Hari Aksara tahun ini, segenap pihak perlu bekerja sama dalam merumuskan strategi dan formula efektif mengentaskan masyarakat dari buta aksara. Strategi ini harus bersifat holistik dan sinergis, antara aspek politik, pendidikan, dan sistem kebudayaan masyarakat. Artinya, selain paralel dengan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan buta aksara juga harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil.

Strategi demikian, sejatinya memiliki kesesuaian dengan langkah Presiden Yudhoyono, khususnya dalam Inpres No 5 Tahun 2006 lalu. Inpres ini di antaranya berisi pernyataan bahwa pemberantasan buta aksara dilakukan dengan

kerjanya dapat dilakukan melalui pimpinan ranting dan pimpinan cabang. Kelompok-kelompok pengajian yang selama ini ada dapat dijadikan modal untuk pendidikan membaca dan menulis. Mereka mudah tergerak atau tersadarkan oleh ikatan emosional ormas. Contoh yang dilakukan Muhammadiyah dengan mengadakan Program Keaksaraan Fungsional Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPJM) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain baik di Jawa maupun luar Jawa, adalah salah satu inisiatif yang perlu diperluas dan dikembangkan secara terus-menerus.

Pengaktifan kembali pusat-pusat pembelajaran dan perpustakaan di desa juga penting. Pusat pembelajaran yang dahulu dibina melalui sawisma sudah saatnya menjadi penyokong sekaligus ujung tombak pemberantasan buta aksara. Perpustakaan desa yang menurut data Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal berjumlah 5.552 sudah saatnya dikembangkan dan ditingkatkan hingga mencapai 70.611 atau seluruh desa di Indonesia. Program ini lebih mempunyai nilai dan makna daripada pemerintah susah payah membuat taman bacaan masyarakat di

mal. Selain lebih merakyat, program 'perpustakaan masuk desa' dapat mempercepat proses pemberantasan buta aksara.

Dengan semakin meningkatnya tingkat melek huruf di desa, beberapa target Millennium Development Goals (MDGs) akan segera tercapai, yaitu menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan serta mencapai pendidikan dasar secara universal pada 2015. Dengan demikian baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai kewajiban yang sama dalam memberantas buta aksara dengan turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari seluruh anggota masyarakat, penyakit sosial ini akan semakin parah dan akan menelan banyak korban.



Buta Huruf (PBH) atau Kursus ABC. Tahun 1951 pemerintah menyusun rencana Sepuluh Tahun PBH, dengan harapan buta aksara akan selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Keadaan itu membuat gerah Presiden Soekarno, dan pada tahun itu juga presiden mengeluarkan komando untuk menuntaskan buta huruf sampai 1964.

Pada 1966, digulirkan kembali PBH fungsional. PBH saat itu dibagi dalam tiga tahapan, yakni PBH permulaan, PBH lanjutan I, dan PBH lanjutan II. Bahan belajar PBH permulaan menggunakan buku kecil *Petani Belajar Membaca* yang diselesaikan 20-30 hari. Selanjutnya, mulai 1970-an dirintis program Kejar Paket A, yaitu program PBH dengan menggunakan bahan belajar Paket A yang terdiri atas Paket A1 sampai A100. Hingga tahun 1995, program PBH masih terus dilakukan di sembilan provinsi

Menurut Paulo Freire (1999), persoalan buta aksara sejatinya bertalian erat dengan aspek politik, pendidikan, dan sistem budaya masyarakat. Meski demikian, aspek politik memiliki pengaruh sangat kuat sekaligus sebagai kunci utama. Itu karena politik lebih sering menjadikan problem buta huruf sebagai komoditas kampanye, yang mampu menarik dukungan rakyat di samping kemiskinan. Sebagai isu yang sensitif, buta huruf akan menutupi kualitas, kredibilitas atau kubu asal calon. Singkatnya, asal mengusung isu atau tema-tema itu, rakyat sudah pasti akan mendukung. Fakta itu dapat kita lihat pada rekam jejak beberapa kandidat capres yang maju pada Pilpres 2009. Mereka juga menggunakan isu buta huruf dan kemiskinan sebagai kendaraan utamanya.

Kembali ke desa

Sebelum generasi mendatang teng-

mengerahkan seluruh kekuatan politik (vertikal) dan horizontal, mulai dari presiden, menteri terkait, gubernur, wali kota/bupati, camat, sampai kepala desa. Adapun pendekatan horizontal, dilakukan dengan melibatkan berbagai organisasi kebudayaan, LSM, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.

Peran serta organisasi sosial keagamaan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah dan NU dapat bekerja sama dengan organisasi otonomnya seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dahulu Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Fatayat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan seterusnya. Program

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opini@yaho.com atau fax: (021) 5812105 (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).



Oleh **Ahmad Baedowi**
Direktur Pendidikan
Yayasan Sukma, Jakarta

CALAK EDU

Melek Aksara

MELEK aksara (*literacy*) adalah harapan semua orang agar bisa dihargai. Sebagai sebuah pemenuhan hasrat kemanusiaan, melek aksara sebanding dengan harapan setiap individu di muka bumi ini untuk ikut serta dalam meningkatkan partisipasi sosial. Jika partisipasi sosial meningkat, dominasi satu golongan terhadap golongan lainnya pasti akan berkurang, kekerasan menurun, dan kesejahteraan hidup manusia di dunia ini menjadi lebih mungkin untuk diwujudkan. Dalam bentuk yang paling formal, melek aksara adalah tujuan dan agenda paling mendasar dari proses pendidikan.

Begitu pentingnya melek aksara ini, *Los Angeles Times* (2009) pernah memuat laporan khusus tentang ini dengan menyebut melek aksara sebagai sebuah keterampilan yang dapat mendorong tercapainya cita-cita negara dalam berdemokrasi. "No skill is more crucial to the future of a child, or to a democratic and prosperous society,

than literacy." Melek aksara dengan demikian merupakan tumpuan masa depan anak-anak sekaligus tumpuan kehidupan demokrasi di seluruh dunia. Tak ada satu pun negara di dunia ini, baik penganut sistem demokrasi terbuka maupun tertutup, yang tak menyebutkan soal melek aksara sebagai isu politik dan kemanusiaan sekaligus.

Abdul Qadeer Khan, ilmuwan dan ahli nuklir kontroversial asal Pakistan bahkan banyak menginisiasi program-program buta aksara dalam kampanye program nuklirnya. Baginya program nuklir dapat menjelma menjadi lapangan pekerjaan masif yang dapat menyejahterakan rakyat banyak. Dengan meyakini hadis Nabi bahwa kemiskinan merupakan pangkal kekafiran dan kebodohan, Khan percaya bahwa akar kemiskinan, sikap tidak toleran, kebencian, dan intoleransi adalah kebodohan. "Hatred, intolerance, poor hygienic conditions and violence all have roots in illiteracy," tegas Khan. Karena itu, tugas setiap orang,

pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi kebodohan.

Jika melek aksara identik dengan kecerdasan, sedangkan buta aksara (*illiteracy*) adalah kebodohan, dalam dunia pendidikan kedua terminologi ini harus serius dikaji, baik secara budaya maupun sosial. Sebab jika kondisi ini hanya dimaknai dengan ketidakmampuan baca-tulis semata, idiom tentang ragam kecerdasan (*multiple intelligence*) ala Gardner (2006) pastilah tak mendapat rujukan. Karena itu ada baiknya juga jika terminologi buta aksara juga diimbangi dengan melihat sisi lain dari ragam bakat dan minat masyarakat, terutama dalam berkomunikasi antarsesama mereka.

Duta UNESCO di Indonesia, Arief Rahman Hakim, pernah mengusulkan agar pemerintah Indonesia memiliki lima strategi untuk mempercepat pengentasan masyarakat dari buta aksara hingga 5% dari total penduduk pada 2015. Pertama, pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat.

Kedua, perluasan informasi dan sosialisasi pentingnya melek aksara. Ketiga, pemberdayaan sekolah formal dan nonformal bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Keempat, program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan di luar sekolah. Kemudian, kelima, menjalin kemitraan dengan UNESCO.

Yang menarik dari tawaran strategi yang tak pernah muncul ke permukaan secara publik adalah pemetaan. Selain itu, redefinisi kata buta aksara juga harus dilakukan dengan benar karena menyangkut kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang tinggal lebih banyak di perdesaan. Pentingnya pemetaan dan redefinisi buta aksara akan membuat program pemerintah lebih fokus dalam membuat dan menjalankan program penurunan buta aksara.

Salah satu contoh menarik Edu temukan dalam diri Halimah, seorang wanita 77 tahun yang terbilang sukses membesarkan dan mendidik anak-

anaknya sebagai *single parent* sejak tahun 1965. Halimah tak bisa bacatulis huruf Latin, tapi bisa membaca huruf Arab alias mengaji. Keterampilan berdagangnya juga sangat bagus. Jika definisi buta aksara adalah semata kemampuan baca-tulis Latin, Halimah termasuk dalam kategori buta aksara. Halimah tak sengsara atau miskin. Dengan kepeduliannya mengaji dan berdagang, dia menjadi pengusaha yang cukup sukses di kampungnya.

Ada banyak orang serupa Halimah yang memiliki kemampuan membaca huruf Arab, huruf China, huruf Sanskerta, dan Pegon, tapi tak bisa menulis. Mereka mungkin eksis dalam dunianya seperti menjadi petani, pedagang, dan sebagainya. Pentingnya dilakukan redefinisi dan pemetaan buta aksara secara komprehensif adalah sebuah kecerdasan, agar angka-angka buta aksara tidak menjadi komoditas politik para pejabat negara yang hanya peduli dengan jumlah program agar anggaran menjadi berlipat ganda. Melek dan buta aksara adalah persoalan kemanusiaan sepanjang masa, angka dan logika semata tak akan mampu mencerna sepenuhnya.

MI MEDIA INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Youssi Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Rahni Lowhur-Schad
Direktur Pemberitaan: Saur M. Hutabarat
Dewan Redaksi Media Group: Elman Saragih (Ketua), Ana Widjaya, Andy F.Noya, Bambang Eka Wijaya, Djadhat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur-Schad, Saur M. Hutabarat, Sugeng Suparwoto, Suryoprato, Toeti Adhitama

Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato, Saur M. Hutabarat
Kepala Divisi Pemberitaan: Usman Kansong
Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban
Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi
Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahjudi

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar, Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Ono Sarwono, Rosmery C.Sihombing
Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Agus Wahyu Kristianto, Ciri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Fitriana Siregar, Gantyo Koespradono, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida, Jaka Budisantosa, Lintang Rowe, Mathias S. Brahmana, Moehamad Anwar Surachman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sitabari, Seolitejono

Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agus Wibowo, Ahmad Maulana, Ahmad Puntio, Anton Kustedja, Aries Wijaksana, Asep Toha, Basuki Eka Purnama, Bintang Krisanti, Clara Rondonuwu, Cornelius Eko, David Tobing, Denny Parsaulian, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edwin Tirani, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Eri Anugrah, Fardiansah Noor, Gino F. Hadi, Handi Andrian, Heni Rahayu, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iis Zalnika, Intan Juita, Irena Shalindra, Irvan Sihombing, Jajang Sumantri, Jerome Eugene, Jonggi Panghutan M., K. Wisnu Broto, Kennerton Hutasoit, M. Soleh, Maya Puspitasari, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhammad Fauzi, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Ratna Nuraini, Rina Garmina, Rommy Pujiarto, Selamat Saragih, Sica Harum, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Sitrira Hamid, Sugeng Sumaryadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalati Yani, Tutus Subronto, Wendy Mehari, Windy Dyah Indriantari, Zubada Hanum

Biro Redaksi: Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

MICOM

Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan
Redaktur: Agus Trivibowo, Asnawi Khaddaf, Patna Budi Utami, Widhoroso
Staf: Abadi Surono, Abdul Salam, Alfani T. Witjaksono, Charles Silaban, M. Syaifulhah, Nurtjahyadi, Panji Arimurti, Prita Daneswari, Rani Nuraini, Ricky Julian, Widjokongko, Wisnu Arto Subari.

PUBLISHING

Asisten Kepala Divisi: Jessica Huwae
Staf: Adeste Adipriyanti, Regina Panontongan, Sem Sahala Purba

CONTENT ENRICHMENT

Asisten Kepala Divisi: Yohanes S. Widada
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmimi S, Rudi Negara

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Mahmudi, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK

Redaktur: Diana Kusnati, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Annette Natalia, Bayu Wicaksono, Budi Haryanto, Budi Setyo Widodo, Dharmasoleh, Donatus Ola Pereda, Endang Mawardi, Gugun Permana, Hari Syahrir, Haryadi, Marionsandez G. M. Rusli, Muhammad Nasir, Muhammad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkiana Ismono, Permana, Tutik Sunarsih, Warta Santosi, Winston King

Manajer Produksi: Bambang Sumarsono
Deputi Manajer Produksi: Asnan
Direktur Pengembangan Bisnis: Alexander Stefanus
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujiyono
Asisten Kepala Divisi Sirkulasi-Distribusi: Tweeki Triandianto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Medan: A Masduki Kadro (061) 4514945; Padang: Yondri (0751) 811464; Pekanbaru: Ferry Mustanto (0761) 856647; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Bogor: Arief Ibnu (0251) 8349985; Denpasar: Pieter Sahertian (0361) 239210; Lampung: Muharis (0721) 773888; Semarang: Desijohn (024) 7461524; Yogyakarta: Andi

Yudhanto (0274) 7497289; Palembang: Andi Hendriansyah (0711)317526
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percontakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812102, 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percontakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN